

EVALUASI PROGRAM IMPLEMENTASI STANDAR PAUD

MARIA GORETI V. ANAMARA

PAUD PPs Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur. E-mail: Paud.ppsunj@gmail.com

Abstract: *The evaluation research aimed to acknowledging the effectiveness of the implementation of early childhood education standards in Negeri Pembina kindergarten. The evaluation research is selected as a research method, use the CIPP model from Daniel Stufflebeam. The instrumen were use in this research is interview, observation, document study and questionnaire and analysizing data use the descriptive statistic and qualitative technique. The result of reasearch give a conclusion that the implementation of early childhood standards has not been effective. It was seem from (1) Teacher average graduation of SPGTK, (2) Headmaster of Negeri Pembina kindergarten garduation of DII PGTK, (3) Negeri Pembina kindergarten has not been the curriculum, (4) Semester program acktivity and weekly activities plan were order to Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI), (5) format and contain of daily aktivities plan were make copy paste, (6) Assessment for progress of children were generally for each children. Some aspect were relative like as, development aspect, utilities and infrastructure.*

Keywords: *Evaluation Program, Implementation, Early Childhood Education Standard*

Abstrak: Penelitian evaluasi bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan standar PAUD di TK Negeri Pembina Ende. Penelitian menggunakan metode evaluasi dan model CIPP dari Daniel Stufflebeam. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi dokumen, dan angket. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan standar PAUD belum berjalan efektif, dimana kualifikasi akademik guru adalah tamatan SPGTK, kualifikasi akademik kepala sekolah setingkat DII PGTK, sekolah tidak memiliki kurikulum, program kegiatan semester dan rencana kegiatan mingguan/RKM disusun melalui wadah IGTKI, dan penilaian terhadap peserta didik belum dilakukan secara individu. Tentang sarana dan prasarana, gedung sekolah didirikan dekat makam, gedung belakang dan samping kanan sekolah berbatasan dengan lahan yang lebih tinggi menyerupai tebing, alat permainan edukatif/APE dalam ruang kelas dalam kondisi tidak bersih, tidak diperbarui dan masih ada yang belum sesuai dengan area yang ada. Alat permainan luar ruang beralaskan lantai belum memperhatikan faktor keselamatan anak.

Kata kunci: *Evaluasi Program, Implementasi, Sstandar PAUD.*

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Standar Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, pembinaan terhadap anak usia dini menjadi perhatian dari berbagai kalangan baik masyarakat, individu, kelompok maupun lembaga dengan hadirnya berbagai jalur penyelenggaraan PAUD baik dalam bentuk formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Atfal

(RA) dan bentuk lainnya, non formal berbentuk Taman penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat dan informal berbentuk Posyandu PAUD (Pos PAUD) di tengah masyarakat. Hal ini menjadi sebuah indikator semakin membaiknya perhatian dan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini. Namun di sisi lain penyelenggaraan PAUD ditemukan beberapa permasalahan terutama sumber daya manusia yakni kualitas guru, pembelajaran yang monoton dan berfokus pada guru, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan anak, ketersediaan dan penggunaan bahan ajar, alat peraga dan buku pegangan (Usakli, 2010: 215-217).

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD, yang terdiri atas (1) standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (3) standar isi, proses, dan penilaian; dan (4) standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembi-

ayaan. Standar PAUD diharapkan menjadi standar acuan minimal bagi masyarakat dan *stakeholders* untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini (Brown, 2010: 3-4). Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada termasuk yang ada di taman kanak-kanak Negeri Pembina, kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sekolah ini guru TK rata-rata berkualifikasi SPG-TK dan belum pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan PAUD. Dalam membuat perencanaan dan kegiatan pembelajaran, guru belum memperhatikan kebutuhan, minat dan karakteristik anak. Penilaian perkembangan peserta didik dicatat seadanya tanpa menggunakan format yang baik untuk masing-masing peserta didik.

Hal lainnya adalah guru melakukan penilaian secara *general* maksudnya capaian perkembangan anak tidak dicatat secara individu melalui salah satu instrumen penilaian melainkan dicatat secara bersama-sama atau digabung antara anak yang

satu dengan yang lainnya. Terkait metode pembelajaran, maka TK Negeri Pembina masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru, peserta didik hanya mengikuti instruksi gurunya. Kondisi lainnya masih terbatasnya sarana belajar baik yang dipakai guru dalam proses pembelajaran maupun yang ada di sentra. Tentunya kondisi-kondisi yang dipaparkan di atas tidak diharapkan berlangsung dalam waktu yang panjang. Pihak sekolah dan juga pemerintah yang diwakili oleh dinas kabupaten setempat perlu mengatasi kondisi yang ada guna perbaikan mutu dan peningkatan kualitas sekolah dan peserta didiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh bahwa peran terberat pemerintah dan lembaga-lembaga PAUD saat ini adalah melatih guru-guru PAUD dan memastikan guru yang menyentuh anak-anak memiliki kemampuan minimal, sehingga dimanapun dia melakukan, apapun bentuk satuan pendidikannya, guru tersebut harus menguasai prinsip-prinsip dasarnya (Jalal, 2012). Berdasarkan permasa-

lahan di atas, maka evaluasi terhadap implementasi standar PAUD penting dilakukan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas standar PAUD dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di TK Negeri Pembina kabupaten Ende.

Penelitian ini menggunakan model evaluasi yang berorientasi pada komponen *context*, *input*, *proses* dan *product* atau evaluasi CIPP (Tan, Lee, and Hall, 2011: 1-5). Keempat komponen yang disebutkan di atas merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program. Dengan kata lain model CIPP merupakan model evaluasi yang memandang program sebagai sebuah sistem. Model evaluasi ini merupakan model yang cukup komprehensif dan dapat menjangkau program yang luas.

Pendidikan Anak Usia Dini

Undang-undang Standar Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan PAUD sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Bredekamp dan Copple menyatakan *early childhood education refers to the programs and setting that serve young children from birth through the eighth year of life* (Jackman, 2009: 12). Program bagi anak usia dini memerlukan filosofi yang dapat membimbing pengajaran dan pembelajaran, didasari atas teori-teori bagaimana mengajar dan bagaimana anak belajar serta kurikulum yang dipilih untuk membimbing seluruh aktivitas dan pengalaman yang dapat diberikan kepada anak (Morrison, 2012:94). Prinsip yang seharusnya diperhatikan dalam PAUD yaitu: konsep belajar sambil bermain, kedekatan dengan lingkungan, alam sebagai sarana pembelajaran, anak belajar melalui panca inderanya, konsep kecakapan hidup, anak sebagai pembelajar aktif, pendidik wajib dekat dengan anak dengan penuh kasih sayang, serta

etika dan estetika terhadap anak (Santoso, 2011: 5).

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 bahwa pendidikan anak usia dini berfungsi untuk membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Hal tersebut penting dilakukan mengingat tujuan pendidikan anak usia dini adalah membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan

sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Standar PAUD

Standar diartikan sebagai kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang memuat spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang dinyatakan <http://www.dephut.go.id>). Standar sebagai pernyataan yang menentukan apa yang harus diketahui dan mampu dilakukan murid, harapan-harapan terhadap pembelajaran murid (Morrisonm, 2012: 130). Standar PAUD secara khusus dituangkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, dengan empat pilarnya yakni: (1) standar tingkat pencapaian perkembangan, (2) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (3) standar isi, proses, dan penilaian, (4) standar

sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi model CIPP dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan, angket.

Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain. Sedangkan untuk data kuantitatif akan menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk persentase dan diagram batang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Konteks

Hasil evaluasi pada komponen konteks menunjukkan bahwa TK Negeri Pembina belum memiliki semua dokumen yuridis yang menjadi landasan formal bagi penye-

lenggaraan PAUD. TK hanya memiliki beberapa dokumen sebagai landasan dalam menyelenggarakan PAUD yaitu Permendiknas No. 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD, dokumen sekolah, tata cara penyelenggaraan taman kanak-kanak serta penerimaan siswa baru.

Komponen Masukan

1. Peserta didik

Hasil evaluasi menemukan peserta didik di TK Negeri Pembina terbagi ke dalam dua kelompok usia, yakni usia 4-5 tahun disebut kelompok A, dan usia 5-6 tahun, kelompok B. Dua kelompok ini terbagi ke dalam enam kelas dimana masing-masing kelas didampingi satu orang guru. Meski tidak diatur dalam standar PAUD terkait jumlah anak per kelompok usia yang semestinya diterima di suatu sekolah, temuan evaluasi memperlihatkan ada perbandingan yang cukup mencolok antara jumlah kelompok usia 4-5 tahun (16% atau 18 anak) dan 5-6 tahun (84% atau 98 anak) yang diterima di TK Negeri Pembina pada tahun ajaran 2012/2013. Peserta didik usia

4-5 tahun hanya satu rombongan belajar, sedangkan usia 5-6 tahun memiliki lima rombongan belajar. Dari hasil wawancara diketahui bahwa perbedaan kuota yang cukup mencolok ini disebabkan oleh sistem perekrutan peserta didik yang membatasi jumlah usia 4-5 tahun dengan alasan masih terlalu kecil untuk dididik serta membutuhkan pekerjaan ekstra untuk membimbing kelompok usia ini.

Dari sisi standar PAUD, maka pengelompokan peserta didik yang dilakukan oleh TK Negeri Pembina telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun, dari temuan lain terkait sistem perekrutan, sebaiknya TK ini perlu meninjau ulang penentuan jumlah atau kuota anak berdasarkan usia agar tidak menimbulkan asumsi adanya praktek diskriminasi dan ketidakadilan dalam proses perekrutan murid baru.

2. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Implementasi standar PAUD pada *point* ini belum menunjukkan hasil sebagaimana disyarat-

kan dalam standar PAUD. Temuan evaluasi menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki guru dengan pendidikan rata-rata setingkat SPG-TK, hanya satu guru yang menyelesaikan pendidikan D II PGTK dari Universitas Terbuka. Guru-guru ini belum pernah mendapat pelatihan terkait bidang pendidikan dan pengajaran yang digelutinya. Padahal standar PAUD mengharuskan pendidik pada TK menamatkan pendidikan sarjana (S1) jurusan pendidikan atau psikologi dan memiliki beberapa kompetensi yang disyaratkan. Jika konsep awal lahirnya standar PAUD adalah semangat standarisasi, maka perlu dipikirkan upaya agar guru-guru pada TK Negeri Pembina dapat memiliki kompetensi setara dengan guru-guru yang memiliki latar pendidikan S1 pendidikan atau psikologi sehingga kemampuan yang mereka miliki dianggap layak dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Ini beralasan karena mutu guru yang baik akan menghasilkan *output* peserta didik sesuai tumbuh kembang yang diharapkan sebagaimana diatur juga dalam standar PAUD.

Dalam konteks *staffing* atau perekrutan guru yang berlaku di TK Negeri Pembina, diketahui wewenang pengadaan guru sepenuhnya berada pada dinas pendidikan setempat. Wewenang yang dimiliki dinas pendidikan termasuk dalam mengatur mutasi guru dari sekolah yang satu ke sekolah yang lainnya.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah dan tenaga administrasi. Evaluasi pada komponen *input* tenaga kependidikan menemukan bahwa kepala sekolah belum memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur standar PAUD, sedangkan kualifikasi staf administrasi sesuai dengan yang disyaratkan. Kepala sekolah di TK Negeri Pembina, memiliki latar pendidikan DII PGTK dari Universitas Terbuka. Terkait tenaga administrasi maka di sekolah ini tenaga administrasi memiliki kualifikasi setingkat SMA, yang bertugas melakukan pengetikan dengan fasilitas komputer yang kebetulan dimiliki lembaga ini. Selebihnya mengatur berkas-berkas yang ada, mengatur APE dan jika ada kegiatan *extra feeding* maka staff

ini yang akan memasak dan menyikapkannya di dapur sekolah. Jika diamati dari segi kompetensi yang dimiliki, maka tidak semua kompetensi dapat dilakukan oleh staf administrasi karena sebagian besar kompetensinya masih di *handle* oleh kepala sekolah.

3. Isi Program

Evaluasi pada tahap ini menemukan bahwa TK Negeri belum dapat menyusun kurikulum pembelajarannya sendiri. Kurikulum yang dipakai sekolah berasal dari dinas pendidikan propinsi, sekolah tidak melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam hal alokasi waktu belajar, temuan evaluasi menunjukkan pembagian waktu belajar kelompok usia 4-6 tahun adalah 150 menit, yang dimulai sejak pukul 7.30 dan berakhir pada pukul 10.00. Pertemuan dilakukan sepanjang minggu dari hari Senin sampai Sabtu, efektif dalam 17 minggu per semester. Tampaknya pembagian waktu ini tidak melenceng dari aturan yang ditetapkan. Sekolah memiliki kalen-der pendidikan yang

mengatur kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun, meski terkesan dibuat seadanya pada kertas folio, dan ditulis tangan namun kalender ini dapat menunjukkan bagaimana pengaturan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Ini artinya sekolah TK Negeri Pembina sudah mampu melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu setahun.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana relatif baik, terlihat pada beberapa hal seperti gedung sekolah, luas tanah, dan transportasi telah menunjukkan bahwa sekolah ini sudah memenuhi syarat, dimana luas tanah yang dibutuhkan untuk mendirikan gedung TK Negeri Pembina jauh lebih besar melebihi standar yang ada yakni 1035 m². Namun, dari segi lokasi gedung TK Negeri Pembina berada pada bagian yang landai sehingga nampak bagian kanan dan belakang gedung sekolah berbatasan langsung dengan tebing (di bawah tebing). Persis di belakang sekolah, meski di atas ketinggian merupakan tempat

pemakaman.

Temuan lainnya adalah halaman sekolah ini tidak dipagari meskipun berbatasan langsung dengan jalan utama. Dalam hal prasarana lainnya, gedung sekolah ini dibangun permanen, dengan dinding bagian depan sekolah di cat khas anak. Lantai sekolah dipasang ubin nampak bersih, atap sekolah dari seng, dan tidak ada bocor. Umumnya sekolah ini memiliki ruang yang sesuai dengan aturan standar PAUD. Dinding antar ruang dibuat permanen berbahan semen atau beton, namun satu ruang ditemukan bersekat tripleks yang tidak utuh sehingga kegiatan belajar mengajar di kedua ruang ini sering terganggu. Pengadaan sarana *indoor* yang mendukung proses pendidikan anak usia dini masih perlu ditingkatkan, maksudnya material atau peralatan yang dikenal dengan istilah APE perlu disesuaikan dengan bidang-bidang pengembangan anak. Selain itu material yang diletakkan pada area bermain anak belum sepenuhnya mewakili gambaran yang ada karena alat bermain anak di

sekolah ini belum memadai, terlihat usang, berdebu dan belum sepenuhnya mewakili area.

sarana *outdoor* meliputi permainan yang digunakan di luar ruangan. Di sekolah sudah tersedia permainan di halaman sekolah untuk melatih motorik kasar anak seperti alat panjat, peluncur, jungkat jungkit, ayunan, bak pasir dan alat putaran mini, salah satu permainan yakni peluncur terbuat dari semen sehingga dari sisi keamanan bisa membahayakan anak termasuk pijakan tempat alat-alat ini diletakkan juga dibuat dari semen.

5. Pengelolaan

Evaluasi pada tataran ini memperlihatkan bahwa TK Negeri Pembina telah memiliki visi, misi dan tujuan pendidikan yang dirumuskan bersama oleh kepala sekolah, pendidik, dan komite sekolah.

6. Pembiayaan

Hasil evaluasi pada tataran pembiayaan menemukan bahwa sumber pembiayaan TK Negeri Pembina berasal dari pemerintah

pusat, propinsi, kabupaten, dan peserta didik dalam bentuk uang sekolah dan uang seragam. Hanya dari sisi pemanfaatan terlihat adanya ketimpangan diantara pos pengeluaran yang ada. Besaran biaya yang digunakan sekolah ini untuk biaya operasional pendidikan tak langsung lebih besar dibanding pengeluaran untuk pos lainnya, dimana 52%, untuk *sallery* dan tunjangan hari raya 23%, administrasi 14%, dan sisanya 11% untuk belanja APE, seperti tampak pada gambar 4.5. Jika dikaitkan dengan kondisi sarana yang ada di sekolah ini, akan kelihatan sekolah ini belum mampu memanfaatkan keuangan yang ada untuk membiayai kebutuhan pendidikan yang berhubungan langsung dengan proses belajar anak, termasuk alokasi dana untuk *capacity building staff* yang ada di sekolah ini.

Komponen Proses

1. Perencanaan

Temuan evaluasi memperlihatkan perencanaan kegiatan semester, dan penyusunan rencana kegiatan mingguan (RKM) tidak dilakukan

oleh pihak sekolah. Perencanaan kegiatan semester dan rencana kegiatan mingguan disusun bersama melalui wadah Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia atau IGTKI dengan alasan solidaritas dan *unity*. Program semester dan rencana kegiatan mingguan (RKM) yang telah disusun, kemudian didistribusikan ke sekolah yang berada dalam satu gugus dan sekolah-sekolah tersebut membayar ke IGTKI sebagaimana tergambar dalam alur berikut. Dalam penyusunan rencana kegiatan harian (RKH), temuan evaluasi menunjukkan pembuatan RKH dilakukan oleh guru di sekolah. Tanpa ada *scedule* yang dibuat kepala sekolah, guru-guru bebas menyusun RKH bisa untuk seminggu, atau penyusunan bisa dilakukan sehari sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Rata-rata guru mengatakan hampir tidak ada kendala yang berarti dalam membuat RKH karena pengalaman mengajar yang tinggi, namun masih ditemukan adanya perbedaan format antara guru yang satu dengan yang lain.

2. Pelaksanaan

Semua ruang kelas di TK Negeri Pembina telah di *setting* secara permanen, maksudnya area dan peralatan telah ditetapkan pada lokasi masing-masing dengan maksud tidak akan berubah lagi pada kegiatan belajar seterusnya sampai anak meninggalkan TK Negeri Pembina. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa guru tidak melakukan penataan ulang untuk kegiatan belajar hari-hari selanjutnya, meski sebenarnya guru memiliki otoritas untuk mengubah lingkungan kelas anak guna mendukung proses kegiatan belajar yang menarik, dan tidak membosankan. Selain itu, penggunaan alat permainan edukatif pada saat kegiatan selalu sama, meskipun dari sisi keamanan sesuai bagi anak karena umumnya material berbahan plastik dan kayu. Namun dari sisi kesehatan sangat relatif karena ada material yang terawat dan sebagiannya tidak, dengan kondisi usang dan berdebu. Alat-alat ini juga tidak sepenuhnya sesuai dengan fungsi stimulasi yang telah direncanakan karena terkesan hanya untuk memenu-

hi syarat yakni setiap area ada materialnya tanpa mempertimbangkan sebetulnya material apa yang sesuai dengan area serta bidang pengembangan anak.

Pengorganisasian kegiatan menunjukkan kegiatan pembelajaran lebih dominan di lakukan dalam ruang kelas, kegiatan *outdoor* sebatas bermain saat jam istirahat, olahraga dan apel bendera. Meski pengelolaan kegiatan sudah terdiri atas kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan penutup, namun ditemukan tidak ada perbedaan antara pengelolaan kegiatan dalam kelompok besar dan kelompok kecil karena semua kegiatan berpusat kepada guru. Hal lainnya, sekolah ini menekankan kegiatan yang syarat kognisi yakni membaca, menulis, dan berhitung sehingga semua kegiatan belajar diarahkan agar anak dapat menguasai ketiga hal itu, ini dapat di lihat pada program kegiatan semester dan RKM yang mengarah pada calistung.

3. Penilaian

Penilaian anak tidak dilakukan secara kualitatif atau melalui

narasi atau deskripsi yang menjelaskan capaian anak didik, sebaliknya penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda bintang. Tiap jumlah bintang mewakili kemampuan anak didik. Namun cara ini tidak *fair*, karena penilaian seperti ini tidak dilakukan per individu melainkan kemampuan beberapa anak digabung menjadi satu dengan tanda bintang. Meski demikian, penilaian yang dilakukan sudah memperhatikan tingkat pencapaian perkembangan peserta didik, namun dalam hal status kesehatan masih belum ditemukan.

Komponen Hasil

Evaluasi pada tataran ini memperlihatkan bahwa laporan hasil belajar anak dilaporkan sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak yang diatur dalam standar PAUD. Artinya tiap aspek pengembangan anak dijelaskan tingkat ketercapaiannya. Kelemahan terkait cara melakukan penilaian yang digunakan TK ini, dimana *progress* semua peserta didik dicatat secara *general* atau dengan kata lain

digabungkan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Padahal tiap peserta didik memiliki ciri atau karakter yang berbeda satu sama satu lain, sehingga mencatat secara individu akan membantu pendidik dalam menilai anak secara lebih mendalam.

Buku laporan penilaian perkembangan anak memakai format buku laporan yang dikeluarkan dinas pendidikan propinsi. Ada beberapa tahapan yang dikerjakan guru dalam membuat laporan hasil belajar anak, yaitu (a) melakukan atau menulis penilaian harian dalam buku rencana kegiatan harian (RKH); (b) memindahkan catatan penilaian harian ke buku rekapitulasi; (c) melakukan analisa perkembangan anak per individu berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah bintang yang diperoleh anak; (d) memindahkan hasil analisa ke dalam buku raport, dan (e) menyerahkan buku laporan atau raport anak kepada orang tua peserta didik. Penilaian sebatas memberikan bintang, kemudian rekapitulasi, dan guru membuat narasi.

Keputusan dan Rekomendasi

Pelaksanaan standar PAUD belum berjalan secara efektif. Tingkat pendidikan yang belum sesuai dengan aturan main, rendahnya pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap fungsi dan tujuan PAUD berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di lembaga ini. Oleh karenanya ada rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki pelaksanaan standar PAUD di TK Negeri Pembina kabupaten Ende, yaitu:

1. sekolah perlu mengalokasikan dana untuk kegiatan studi banding, seminar atau lokakarya baik bagi guru maupun kepala sekolah guna meningkatkan pemahaman tentang pendidikan anak usia dini secara baik dan benar.
2. guru perlu melakukan kegiatan pembelajaran bersama anak di kelas secara variatif melalui *field visiti*, merubah *setting* kelas, pembelajaran dilakukan di luar kelas atau *out door* dan menerapkan metode belajar *student center*.
3. Guru perlu meningkatkan ketersediaan sarana mengajar dan belajar

anak yang bervariasi dengan cara menyiapkan materi belajar yang terus berganti sesuai dengan tema belajar agar anak tidak bosan dan dapat belajar banyak hal.

SIMPULAN

Hasil evaluasi program pada implementasi standar PAUD di TK Negeri Pembina Kabupaten Ende dengan menggunakan model CIPP, antara lain:

1. Komponen Konteks, TK Negeri Pembina belum memiliki semua dokumen yuridis yang menjadi landasan formal bagi penyelenggaraan PAUD.
2. Komponen Masukan, meliputi:
 - a. Peserta didik di TK Negeri Pembina terbagi ke dalam dua kelompok usia, yakni usia 4-5 dan usia 5-6 tahun,
 - b. Tenaga pendidik dan kependidikan, lembaga memiliki guru dengan pendidikan setingkat SPG-TK, DII PGTK
 - c. Isi Program, kurikulum yang dipakai dari dinas pendidikan propinsi,

- d. Sarana dan prasarana, relatif baik, seperti gedung sekolah, luas tanah,
 - e. Pengelolaan, lembaga memiliki visi-misi dan tujuan pendidikan yang dirumuskan bersama oleh kepala sekolah, pendidik, dan komite sekolah.
 - f. Pembiayaan, sumber pembiayaan berasal dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, dan peserta didik dalam bentuk uang sekolah dan seragam.
1. Komponen Proses
 - a. Perencanaan kegiatan semester, dan penyusunan RKM dan RKH disusun bersama melalui wadah IGTKI
 - b. Pelaksanaan meliputi: ruang kelas di *setting* secara permanen; kegiatan pembelajaran dilakukan di ruang kelas; kegiatan sudah terdiri dari pembukaan, inti, dan penutup,
 - c. Penilaian dilakukan dengan memberi tanda bintang, jumlah bintang mewakili kemampuan anak didik.
 2. Komponen hasil, *progress* peserta didik dicatat secara *general*

(digabung). Buku laporan penilaian perkembangan anak memakai format buku laporan yang dikeluarkan dinas pendidikan propinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Jackman, Hilda L. *Early Education Curriculum, fourth edition*. Belmont: Dalmar Cengage Learning, 2009.
- Morrison, George S. *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks, 2012.
- Santoso, Soegeng. *Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Pendidiknya*. Jakarta: Bahan Seminar dan Workshop, 2011.
- Usakli, Hakan. *Early Childhood Education: the case of Turkey, Contemporary Issues in Early Childhood Volume 11 Number 2* 2010, www.worlds.co.uk/CIEC).
- Brown, Christopher P. *Being Accountable for One's Own Governing: a case study of early educators responding to standards-based early childhood education reform, Contemporary Issues in Early Childhood Volume 11 Number 2* 2010, www.worlds.co.uk/CIEC).
- <http://www.dephut.go.id>.
- <http://hostedweb.cfaes.ohio-state.edu>.
- Jalal, Fasli.
- (<http://www.jpnn.com/read/2012>)